



**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-8/MK/2025  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1a-CP Indeks efektivitas belanja dan investasi	92.2
		1b-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1c-CP Indeks integritas	100
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	2a-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100
		2b-N Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	6.1%
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	3a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		3b-N Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%
		3c-N Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80
4	Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis	4a-N Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%
		4b-N Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70
		4c-N Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas	5a-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5
		5b-CP Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%
6	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	6a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%
		6b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%
		6c-CP Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100
7	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	7a-CP Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92.5
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	8a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97.5%
		8b-CP Nilai evaluasi organisasi	100
		8c-N Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		9b-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		pengadaan	
10	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	10a-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%
		10b-CP Indeks efektivitas komunikasi	100

**Program/Kegiatan 2025**

**Anggaran**

Program:

Program Kebijakan Fiskal

Rp4,950,000,000

Kegiatan

1. Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan

Rp4,950,000,000

Program:

Program pengelolaan belanja negara

Rp28,399,139,000

Kegiatan

1. Komunikasi, edukasi dan standarisasi

Rp17,855,117,000

2. Monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Pusat dan TKD

Rp2,405,188,000

3. Pengelolaan anggaran Pusat dan TKD

Rp3,328,584,000

4. Perumusan kebijakan administratif penganggaran Pusat dan TKD

Rp4,810,250,000

Program:

Program dukungan manajemen

Rp47,708,130,000

Kegiatan

1. Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum (DJPK)

Rp29,449,836,000

2. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik (DJPK)

Rp1,094,980,000

3. Pengelolaan organisasi dan SDM (DJPK)

Rp7,906,251,000

4. Pengelolaan risiko, pengendalian, dan pengawasan internal (DJPK)

Rp163,014,000

5. Pengelolaan sistem informasi dan teknologi (DJPK)

Rp8,870,816,000

6. Legislasi dan litigasi

Rp223,233,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sri Mulyani Indrawati

Ditandatangani Secara Elektronik  
Luky Alfirman



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel</b>							
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	50	53.9	53.9	66.4	66.4	92.2	92.2
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat</b>							
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
2b-N	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	1.24%	2.77%	2.77%	4.51%	4.51%	6.1%	6.1%
<b>3</b>	<b>Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel</b>							
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
3b-N	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	3.14%	9.16%	9.16%	16.89%	16.89%	29.5%	29.5%
3c-N	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	80	80	80	80	80	80
<b>4</b>	<b>Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis</b>							
4a-N	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	15%	30%	30%	55%	55%	80%	80%
4b-N	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	15	30	30	55	55	70	70
4c-N	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	83	83	83	83	83	83
<b>5</b>	<b>Formulasi kebijakan yang berkualitas</b>							
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	25%	35%	35%	50%	50%	62%	62%
<b>6</b>	<b>Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis</b>							
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	belanja dan investasi							
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	73	76	76	79	79	92.5	92.5
<b>8</b>	<b>Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif</b>							
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	75%	75%	75%	75%	75%	97.5%	97.5%
8b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
<b>9</b>	<b>Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif</b>							
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif</b>							
10a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
10b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100



Jakarta, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik  
Luky Alfirman



**INISIATIF STRATEGIS**  
**DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	Pengembangan Indeks Regional Wellbeing Indicator	1. Kebijakan Pembangunan Daerah yang Lebih Tepat Sasaran	Januari - Desember	Pengembangan Framework dan Indikator Regional Wellbeing Index	Pengembangan Indikator Regional Wellbeing	Q1-Q4	1. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	176,000,000
			2. Efektivitas dan Efisiensi Pengalokasian Anggaran Daerah 3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah 4. Peningkatan Kualitas Kebijakan Sosial dan Ekonomi Daerah 5. Peningkatan Kualitas	Januari - Desember	Pembangunan Dashboard Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Regional	Dashboard Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Regional			

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025





			Pengelolaan Keuangan Daerah					Keistimewaa n 6. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Jakarta, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik  
Luky Alfirman





**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Luky Alfirman		NAMA	Sri Mulyani Indrawati
NIP	19700327 199503 1 002		NIP	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)		PANGKAT/ GOL RUANG	
JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan		JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan		UNIT KERJA	Kementerian Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92.2	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	Penerima Layanan
		Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	6.1%	Penerima Layanan
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	Penerima Layanan
		Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



		Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	Penerima Layanan
4	Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%	Penerima Layanan
		Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70	Penerima Layanan
		Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	Penerima Layanan
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	Proses Bisnis
		Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%	Proses Bisnis
6	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
		Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	Proses Bisnis
7	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92.5	Proses Bisnis
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Nilai evaluasi organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Pengelolaan keuangan yang	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA	100	Penguatan Internal



	akuntabel dan BMN yang produktif	015		atau Anggaran
		Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sri Mulyani Indrawati



Ditandatangani secara elektronik  
Luky Alfirman  
19700327 199503 1 002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	526 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	50	53.9	53.9	66.4	66.4	92.2	92.2
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
2b-N	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	1.24%	2.77%	2.77%	4.51%	4.51%	6.1%	6.1%
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
3b-N	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	3.14%	9.16%	9.16%	16.89%	16.89%	29.5%	29.5%



3c-N	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	80	80	80	80	80	80
4a-N	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	15%	30%	30%	55%	55%	80%	80%
4b-N	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	15	30	30	55	55	70	70
4c-N	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	83	83	83	83	83	83
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	25%	35%	35%	50%	50%	62%	62%
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
7a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	73	76	76	79	79	92.5	92.5
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	75%	75%	75%	75%	75%	97.5%	97.5%
8b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100





	8c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
	9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
	9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
	10a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	10b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>									
	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Sri Mulyani Indrawati

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

19700327 199503 1 002

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*

